

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI PASAR SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2004-2006**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi



Oleh:  
Veronica Wahyu Kristi Murmaningtyas  
NIM: 032114003

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
2007**

**SKRIPSI**

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI PASAR SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH**  
Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2004-2006

Oleh:  
Veronica Wahyu Kristi Murmaningtyas  
NIM: 032114003

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Firma Sulistiyowati, S.E., M. Si.

Tanggal: 23 April 2007



Pembimbing II



M.T Ernawati, S.E., M.A.

Tanggal: 29 Mei 2007

SKRIPSI

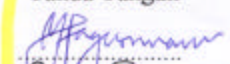

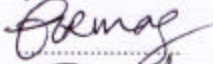

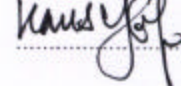
ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI PASAR SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH

Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2004-2006

Dipersiapkan dan ditulis oleh:  
Veronica Wahyu Kristi Murmaningtyas  
NIM: 032114003

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 27 September 2007  
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji:

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt	
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt	
Anggota	Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si	
Anggota	M.T Ernawati, S.E., M.A	
Anggota	Ir. Drs. Hasiadi Yuli Hartanto, M.Si, Akt	

Yogyakarta, 29 September 2007  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Sanata Dharma  
Dekan,



Drs. Alex Kahu Lantum, M.S

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Allah akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya”*

**Pengkotbah, 3 : 11a**






*“Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil”*

**Lukas 1 : 37**

*“Apa yang tidak pernah mati adalah harapan yang ada dalam hati kita”*

**By: Vero**

**Skripsi ini saya persembahkan untuk:**

-  Yesus Kristus dan Bunda Maria yang selalu menuntun aku
-  Santa Veronica yang menjadi santa pelindungku
-  Bapak YB Sumanto dan Ibu MM Mursih
-  Keluarga Besarku
-  Yang tersayang Ganjar



**UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
FAKULTAS EKONOMI  
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: **ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PAD** dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 27 September 2007 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 6 Juni 2007  
Yang membuat pernyataan,

Veronica Wahyu Kristi M

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

- a. Dr. Ir. P. Wiryono P., S. J., selaku Rektor Universitas Sanata Dharma.
- b. Drs. Alex Kahu Lantum, M.S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
- c. Ir. Drs. Hasiadi Yuli Hartanto, M.Si, Akt., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- d. Lisia Apria ni, S.E., M.Si., Akt., selaku Pembimbing Akademik.
- e. Firma Sulistiyowati, S.E, M.Si., selaku Pembimbing I yang telah membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- f. M.T Ernawati, S.E, M.A., selaku Pembimbing II yang dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- g. A. Diksa Kuntara, S.E., M.FA., selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.
- h. Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Daerah (KPPD) yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

- i. Bapak Haris Martapa, selaku Kepala Tata Usaha KPPD yang telah membantu penulis dalam mencari data.
- j. Bapak YB Sumanto dan Ibu MM Mursih yang telah memberikan dukungan doa, moril maupun materiil.
- k. Agustinus Ganjar Wibowo, terimakasih atas perhatian, kesabaran dan dukungannya.
- l. Kakak-kakakku Tutik, (Alm)Tatik, Adi, Koko, (Alm) Mamik, Arti, Muji, Yanti, Yono, dan Yani) terima kasih atas rasa kebersamaan yang telah kalian berikan.
- m. Hanung, Nita, Dika, Mary dan Maxi, terima kasih atas bantuan doanya.
- n. Teman-teman seperjuanganku di USD ( Lina, Atik, Galuh, Tami, Simbah, Toyo dan Heru), terima kasih untuk kebersamaan dan cerita indah kita.
- o. Teman-teman Kos Sambu 2 ( Palma, Anggi, Zita, Cipluk, Rimpenk, Detha, Angela, Era, Ivon) terima kasih atas kebersamaannya.
- p. Teman-teman KKP angkatan XIII ( Fany, Yudha, Welly).
- q. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 6 Juni 2007



Veronica Wahyu Kristi Murmaningtyas

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	6
A. Sumber Penerimaan Daerah.....	6
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	6
2. Dana Perimbangan.....	11
3. Pinjaman Daerah.....	12



4. Lain-lain Penerimaan Daerah yang Sah.....	12
B. Retribusi Pasar .....	12
1. Definisi Retribusi Pasar .....	12
2. Jenis dan Kriteria Pasar .....	13
3. Objek dan Subjek Retribusi Pasar .....	15
4. Wajib Retribusi Pasar .....	16
5. Tarif Retribusi Pasar.....	16
6. Sistem Pemungutan Retribusi Pasar.....	19
C. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	19
D. Efisiensi.....	20
1. Pengertian Efisiensi.....	20
2. Efisiensi Pemungutan Retribusi Pasar.....	20
E. Efektivitas .....	21
1. Pengertian Efektivitas .....	21
2. Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>23</b>
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	23
3. Tempat Penelitian.....	23
4. Waktu Penelitian .....	23
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	23
1. Subjek Penelitian .....	23
2. Objek Penelitian .....	24

D. Teknik Pengumpulan Data.....	24
1. Wawancara .....	24
2. Dokumentasi.....	24
E. Data yang Dicari.....	24
F. Teknik Analisis Data .....	25
1. Efisiensi Pemungutan Retribusi Pasar .....	25
2. Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar .....	26
3. Kontribusi.....	28
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>29</b>
A. Sejarah Kabupaten Sleman.....	29
B. Keadaan Geografis.....	30
1. Letak Wilayah .....	30
2. Luas Wilayah.....	30
3. Topografi.....	32
C. Karakteristik Wilayah.....	32
D. Keadaan Penduduk .....	34
E. Sosial.....	35
1. Pendidikan.....	35
2. Agama .....	37
F. Pemerintahan .....	38
G. Perekonomian.....	41
H. Proses Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Sleman.....	41
<b>BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>

A. Deskripsi Data .....	43
B. Analisis Efisiensi Pemungutan Retribusi Pasar .....	45
C. Analisis Efektivitas Pemungutan Rertibusi Pasar.....	49
D. Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD.....	53
BAB VI PENUTUP .....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Keterbatasan Penelitian .....	57
C. Saran .....	57
DAFTAR PUSTAKA .....	59
LAMPIRAN .....	61

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Efisiensi Pemungutan Retribusi Pasar Tahun 2004-2006.....	26
Tabel 2. Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar Tahun 2004-2006.....	27
Tabel 3. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD Tahun 2004-2006.....	28
Tabel 4. Pembagian Wilayah Administrasi dan Pasar di Kabupaten Sleman.....	31
Tabel 5. Luas Wilayah, Banyaknya Penduduk, Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman, Pertengahan Tahun 2006.....	35
Tabel 6. Banyaknya Pemeluk Agama Menurut Jenisnya di Kabupaten Sleman Tahun 2005.....	37
Tabel 7. Banyaknya Pegawai Pemerintah Daerah Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman, 2005.....	38
Tabel 8. Banyaknya Pegawai Pemerintah Daerah Menurut Instansi dan Pendidikan di Kabupaten Sleman, 2005.....	39
Tabel 9. Distribusi Sektor Unggulan bagi Perekonomian Kabupaten Sleman Tahun 2003-2005.....	41
Tabel 10. Target dan Realisasi PAD Kabupaten Sleman Tahun 2004-2006.....	42
Tabel 11. Uraian Realisasi Penerimaan dan Target Retribusi Pasar Kabupaten Sleman Tahun 2004-2006.....	44

Tabel 12. Biaya Pemungutan Retribusi Pasar Kabupaten Sleman	
Tahun 2004-2006 .....	45
Tabel 13. Efisiensi Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Sleman	
Tahun 2004-2006 .....	47
Tabel 14. Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Sleman	
Tahun 2004-2006 .....	51
Tabel 15. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD di Kabupaten Sleman	
Tahun 2004-2006 .....	54

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2004-2006

Veronica Wahyu Kristi Murmaningtyas  
NIM: 032114003  
Universitas Sanata Dharma  
Yogyakarta  
2007

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi pasar serta mengetahui kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman tahun 2004-2006.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Sleman tahun 2004 sebesar 82,67%, tahun 2005 sebesar 110,32%, tahun 2006 sebesar 135,95% dengan rata-rata efisiensi sebesar 109,65% per tahunnya. Sedangkan efektivitas pemungutan retribusi pasar pada tahun 2004 sebesar 92,89%, tahun 2005 sebesar 101,94%, tahun 2006 sebesar 93,61% dengan rata-rata efektivitas sebesar 96,15% per tahunnya. Dengan demikian pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Sleman selama tahun 2004-2006 tidak efisien karena lebih dari 100% dan tidak efektif karena kurang dari 100%. Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD pada tahun 2004 sebesar 2,97%, tahun 2005 sebesar 3,01%, tahun 2006 sebesar 2,81% dengan rata-rata kontribusi sebesar 2,93%, ini berarti bahwa penerimaan PAD sebesar 2,93% merupakan sumbangan dari retribusi pasar.

## **ABSTRACT**

### **AN ANALYSIS OF THE MARKET RETRIBUTION COLLECTION EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS AND ITS CONTRIBUTION TO REGIONAL ORIGINAL REVENUE A Case Study of Sleman Regency Government in 2004-2006**

Veronica Wahyu Kristi Murmaningtyas  
NIM: 032114003  
Universitas Sanata Dharma  
Yogyakarta  
2007

The purposes of this research were to know the market retribution collection efficiency and effectiveness and also to know the contribution of the market retribution to Regional Original Revenue (PAD) of Sleman Regency in 2004-2006.

The kind of this research was a case study. The data were gained by doing interview and documentation. The data analysis techniques used were quantitative data analysis technique and qualitative data analysis technique.

The result showed that market retribution collection efficiency of Sleman Regency in 2004 was 82,67%, in 2005 was 110,32%, in 2006 was 135,95%, with the efficiency average was 109,65% per year. Whereas, market retribution collection effectiveness in 2004 was 92,89%, in 2005 was 101,94%, in 2006 was 93,61%, with the effectiveness average was 96,15%. Therefore, the collection of market retribution of Sleman Regency during 2004-2006 were inefficient because it was more than 100% and ineffective because it was less than 100%. The contribution of the market retribution to Regional Original Revenue (PAD) in 2004 was 2,97%, in 2005 was 3,01%, in 2006 was 2,81%, with the average contribution was 2,93%, it meant that 2,93% of the Regional Original Revenue (PAD) was the contribution from market retribution.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Era otonomi dimulai pada tahun 2001 yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu landasan bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Namun seiring perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga UU No. 22 Tahun 1999 perlu disesuaikan dan diselaraskan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah kabupaten dan kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Penyerahan berbagai wewenang ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana salah satu komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari retribusi daerah (Riduansyah, 2003: 49).

Pada pemerintah kabupaten dan kota, retribusi pasar merupakan salah satu jenis retribusi daerah dari golongan retribusi jasa umum yang turut



memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, dimana Pendapatan Asli Daerah menjadi tolok ukur kemampuan kemandirian pemerintah kabupaten atau kota dalam membiayai mobilitas pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penerimaan yang berasal dari retribusi pasar guna menunjang Pendapatan Asli Daerah, maka pemerintah daerah harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas dari pemungutan retribusi pasar itu sendiri. Menurut Mardiasmo (2002; 132) efisiensi merupakan perbandingan antara masukan (input) sumber daya oleh suatu unit organisasi dengan keluaran (output) yang dihasilkan sedangkan efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *output* dengan *outcome* (Mardiasmo, 2002: 4).

Terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2003, Pemerintah Kabupaten Sleman memilih memberikan wewenang atas segala urusan mengenai pasar kepada Kantor Pengelolaan Pasar Daerah (KPPD) sebagai instansi yang khusus menangani segala kebijakan teknis, perijinan dan pelayanan umum serta pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pasar, untuk menciptakan pasar yang memadai, tertib dan aman, sehingga memberi manfaat kepada pedagang, masyarakat umum dan memberikan kontribusi riil kepada Pemerintah Kabupaten Sleman.

Di Kabupaten Sleman, retribusi pasar memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan, mengingat bahwa Kabupaten Sleman sendiri memiliki karakteristik masyarakat yang beragam. Sebagian masyarakatnya adalah

masyarakat modern dengan pendapatan dan daya beli yang tinggi, namun mayoritas masyarakatnya justru masyarakat tradisional dengan sistem perekonomian yang sederhana, dimana pasar merupakan salah satu komponen utama dalam perekonomian sederhana tersebut (Tim KPPD, 2005: 2). Selain itu, Kabupaten Sleman juga mempunyai pasar yang cukup banyak yaitu berjumlah 36 pasar dan tersebar di 17 kecamatan (Tim KPPD, 2005: 15). Hal ini merupakan kesempatan bagi Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Kantor Pengelolaan Pasar Daerah (KPPD), dalam menggali penerimaan daerahnya khususnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari retribusi pasar tanpa mengabaikan efisiensi dan efektivitas dari pemungutan retribusi pasar itu sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan dan memberi manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Sleman tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 ?
2. Berapakah besar kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Sleman tahun 2004 sampai dengan tahun 2006.

2. Untuk mengetahui kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman tahun 2004 sampai dengan tahun 2006.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat:

1. Bagi Penulis

Penulis mendapatkan pengalaman di lapangan dalam menerapkan teori dan ilmu pengetahuan yang didapatkan dalam studi dengan kenyataan dalam lingkungan masyarakat yang sebenarnya.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam hal retribusi pasar.

3. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi perpustakaan Universitas Sanata Dharma khususnya bagi pembaca yang memerlukan informasi sesuai dengan masalah yang dibahas oleh penulis.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terdiri dari:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis. Teori-teori tersebut nantinya akan dijadikan sebagai landasan berpikir bagi penulis dalam mengolah data yang diperoleh dan menganalisa permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, data-data yang digunakan dalam penelitian dan teknik analisis data.

## BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini menguraikan tentang sejarah singkat, keadaan geografis, karakteristik wilayah, keadaan penduduk, sosial, pemerintahan, dan perekonomian Kabupaten Sleman yang merupakan tempat penelitian.

## BAB V : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan analisis yang dilakukan penulis dalam menjawab permasalahan yang ada dan memberikan hasil dari analisis tersebut.

## BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran berkaitan dengan hasil penelitian.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Sumber Penerimaan Daerah**

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

Sumber penerimaan daerah yang tercantum dalam UU No. 33 Tahun 2004 pasal 5 terdiri dari :

##### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam UU No. 33 Tahun 2004, sumber-sumber dari Pendapatan Asli Daerah adalah:

##### a. Hasil pajak daerah

###### 1. Pengertian Pajak daerah

Pajak Daerah menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

2. Pajak yang Dipungut di Daerah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Reklame
- d. Pajak Penerangan Jalan
- e. Pajak Hiburan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir

b. Hasil retribusi daerah

1. Pengertian Retribusi daerah

Retribusi daerah menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2. Unsur Retribusi Daerah

Ada empat unsur yang melekat pada pengertian retribusi (Richard dan Wirawan, 2004: 6):

- a. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang.
- b. Sifat pungutannya dapat dipaksakan.
- c. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum.

d. Kontra-prestasi (imbalan) langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi

### 3. Fungsi Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi daerah yang dilaksanakan pemerintah memiliki fungsi sebagai berikut ( Soewondo, 1986: 4):

#### a. Fungsi Penerimaan

Pungutan retribusi dijadikan alat untuk mengumpulkan dana bagi pemerintah daerah terutama yang menyangkut kelancaran penyediaan jasa dan pelayanan kepada masyarakat.

#### b. Fungsi Pengaturan

Pungutan retribusi dipakai sebagai alat untuk menata kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

#### c. Fungsi Manfaat

Retribusi daerah hendaknya dapat meningkatkan kemampuan pembiayaan Pendapatan Asli Daerah serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

### 4. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Adapun jenis-jenis retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah dibedakan menjadi (Mardiasmo, 2003: 101-103):

#### a. Retribusi Jasa Umum

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Kebersihan

3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil
  4. Retribusi Pelayanan Pemakaman
  5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
  6. Retribusi Pelayanan Pasar
  7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
  8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
  9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
  10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
- b. Retribusi Jasa Usaha
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
  2. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
  3. Retribusi Tempat Pelelangan
  4. Retribusi Terminal
  5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
  6. Retribusi Tempat Penginapan
  7. Retribusi Penyedotan Kakus
  8. Retribusi Rumah Potong Hewan
  9. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
  10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
  11. Retribusi Penyeberangan di Atas Air
  12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
  13. Retribusi Penjualan Produksi Daerah



c. Retribusi Perizinan Tertentu

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Trayek

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Perusahaan daerah berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terdiri dari perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan perbankan (BPD dan Bank Pasar) dan industri, pertanian, perkebunan dan lain-lain. Jenis pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain:

- a. Bagian laba perusahaan milik daerah
- b. Bagian laba lembaga bank
- c. Bagian laba lembaga non bank
- d. Bagian laba atas penyertaan modal atau investasi

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan ini meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

## 2. Dana Perimbangan

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Perimbangan terdiri dari:

### a. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

### b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

### c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan

urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan.

### 3. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

### 4. Lain-lain Penerimaan Daerah yang Sah

Lain-lain penerimaan daerah yang sah terdiri dari:

- a. Pendapatan hibah
- b. Pendapatan dana darurat

## **B. Retribusi Pasar**

### 1. Definisi Retribusi Pasar

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 9 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten, yang dimaksud dengan pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, berupa bangunan-bangunan beratap maupun tanah-tanah lapang yang termasuk dalam lingkungan pasar sebagai tempat jual beli umum secara teratur, langsung dan terus menerus memperdagangkan barang maupun jasa.

Retribusi Pasar yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pungutan daerah yang dikenakan atas pemberian fasilitas tempat dasaran pasar.

## 2. Jenis dan Kriteria Pasar

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 9 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten:

### a. Pasar tipe A, kriteria:

1. Jangkauan pengunjung sekurang-kurangnya meliputi wilayah antar provinsi.
2. Fasilitas pasar: los, bango, kios, MCK, mushola, parkir, bongkar muat, gudang, lampu atau penerangan dan pelayanan kesehatan.
3. Komoditas dagangan beraneka ragam, lengkap dan dengan volume komoditas besar.
4. Lokasi pasar terletak dalam moda transportasi yang mudah terjangkau oleh pengunjung.
5. Keamanan berupa adanya pagar, pintu pengaman, satpam dan pemadam kebakaran.
6. Tradisi hari pasar adalah pasar pasaran.
7. Contoh: Di Kabupaten Sleman, pasar tipe A tidak ada

### b. Pasar tipe B, kriteria:

1. Jangkauan pengunjung sekurang-kurangnya meliputi wilayah antar kabupaten.
2. Fasilitas pasar: los, bango, kios, MCK, mushola, parkir, bongkar muat, lampu atau penerangan.

3. Komoditas dagangan beraneka ragam, lengkap dan dengan volume komoditas besar.
  4. Lokasi pasar terletak dalam moda transportasi yang mudah terjangkau oleh pengunjung.
  5. Keamanan berupa adanya pagar, pintu pengaman, satpam dan pemadam kebakaran.
  6. Tradisi hari pasar adalah pasar pasaran.
  7. Contoh: Pasar Prambanan, pasar Godean, pasar Ngijon, pasar Tempel, pasar Turi, pasar Sleman, pasar Deggung, pasar Cebongan, pasar Pakem, pasar Hewan Pakem, pasar Ngino, pasar Sambilegi, pasar Kejambon, pasar Jangkang, pasar Potrojayan, pasar Condongcatur, pasar Gamping, pasar Gentan, pasar Balangan.
- c. Pasar tipe C, kriteria:
1. Jangkauan pengunjung sekurang-kurangnya meliputi wilayah antar kecamatan.
  2. Fasilitas pasar: los, bango, kios, MCK, mushola, parkir, bongkar muat, lampu atau penerangan.
  3. Komoditas dagangan beraneka ragam, lengkap dan dengan volume komoditas sedang.
  4. Lokasi pasar terletak dalam moda transportasi yang kurang terjangkau oleh pengunjung.

5. Keamanan berupa adanya pagar, pintu pengaman, satpam dan pemadam kebakaran.
  6. Tradisi hari pasar adalah pasar pasaran.
  7. Contoh: Pasar Ngablak, pasar Kemloko, pasar Gendol, pasar Kalasan, pasar Tegalsari, pasar Kenaran, pasar Jajanan Sardjito, pasar Wonosari, pasar Kebonagung.
- d. Pasar tipe D, kriteria:
1. Jangkauan pengunjung sekurang-kurangnya meliputi wilayah antar kecamatan.
  2. Fasilitas pasar: los, bango, kios, MCK, mushola, parkir, bongkar muat, lampu atau penerangan.
  3. Komoditas dagangan tidak lengkap dan dengan volume komoditas kecil.
  4. Lokasi pasar terletak dalam moda transportasi yang kurang terjangkau oleh pengunjung.
  5. Faktor jaminan keamanan kurang.
  6. Tradisi hari pasar adalah pasar pasaran.
  7. Contoh: Pasar Srowolan, pasar Hewan Tempel, pasar Medari, Pasar Salakan, Pasar Bronggang, Pasar Pucung, pasar Monjali, pasar Setum.
3. Obyek dan Subyek Retribusi Pasar

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 9 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten pasal 10 dan pasal 11:

Obyek retribusi pasar adalah setiap pemanfaatan tempat dasaran di lingkungan pasar.

Subyek retribusi pasar adalah setiap orang atau badan yang memanfaatkan fasilitas tempat dasaran pasar.

#### 4. Wajib Retribusi Pasar

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 9 Tahun 2001 pasal 12: Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas tempat dasaran.

#### 5. Tarif Retribusi Pasar

Tarif retribusi pasar menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 9 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten telah disesuaikan dengan SK. BUPATI NO. 1/KEP.KDH/A/2004 TGL.3/1/04:

Tarif retribusi digolongkan berdasarkan kelas pasar dan jenis pelayanan yang diperoleh wajib retribusi.

Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

##### a. Pasar tipe A

1. Di dalam los, bentuk los dan bango Rp 250,00/m<sup>2</sup>/hari
2. Di luar los Rp 200,00/m<sup>2</sup>/hari
3. Di dalam kios Rp 300,00/m<sup>2</sup>/hari, apabila ada penambahan tempat dasaran dikenakan retribusi sebesar Rp 500,00/m<sup>2</sup>/hari
4. Untuk penjaja Rp 400,00/hari

##### b. Pasar tipe B

1. Di dalam los, bentuk los dan bango Rp 200,00/m<sup>2</sup>/hari

2. Di luar los Rp 150,00/m<sup>2</sup>/hari
  3. Di dalam kios Rp 250,00/m<sup>2</sup>/hari, apabila ada penambahan tempat dasaran dikenakan retribusi sebesar Rp 400,00/m<sup>2</sup>/hari
  4. Untuk penjaja Rp 200,00/hari
- c. Pasar tipe C
1. Di dalam los dan bango Rp 150,00/ m<sup>2</sup>/hari
  2. Di luar los Rp 100,00 /m<sup>2</sup>/hari
  3. Di dalam kios Rp 150,00/m<sup>2</sup>/hari, apabila ada penambahan tempat dasaran dikenakan retribusi sebesar Rp 200,00/m<sup>2</sup>/hari
  4. Untuk penjaja Rp 200,00/hari
- d. Pasar tipe D
1. Di dalam los dan bango Rp 100,00/m<sup>2</sup>/hari
  2. Di luar los Rp 100,00 /m<sup>2</sup>/hari
  3. Di dalam kios Rp 100,00/m<sup>2</sup>/hari, apabila ada penambahan tempat dasarandikenakan retribusi sebesar Rp 150,00/m<sup>2</sup>/hari
  4. Untuk penjaja Rp 200,00/hari
- e. Untuk pedagang unggas per ekor Rp 200,00/hari
- f. Untuk penjual sepeda per sepeda Rp 200,00/hari
- g. Pasar hewan:
1. Untuk hewan besar (sapi, kerbau dan kuda) per ekor Rp 2.000,00/hari
  2. Untuk hewan kecil ( kambing, domba dan biri-biri) per ekor Rp 500,00/hari



- h. Titipan barang atau lerepan:
  - 1. Di dalam los Rp 50,00 /m<sup>2</sup>/hari
  - 2. Di dalam bango Rp 50,00 /m<sup>2</sup>/hari
- i. Izin menggunakan tempat dasaran berbentuk los dan bango:
  - 1. Pasar tipe A Rp 2.500,00 /m<sup>2</sup>/tahun
  - 2. Pasar tipe B Rp 2.000,00 /m<sup>2</sup>/tahun
  - 3. Pasar tipe C Rp 1.500,00 /m<sup>2</sup>/tahun
  - 4. Pasar tipe D Rp 1.000,00 /m<sup>2</sup>/tahun
- j. Izin menggunakan tempat dasaran berbentuk kios:
  - 1. Pasar tipe A
    - a. Menghadap ke luar pasar atau jalan sebesar Rp 5.000,00/ m<sup>2</sup>/tahun
    - b. Menghadap ke dalam pasar sebesar Rp 4.000,00/ m<sup>2</sup>/tahun
  - 2. Pasar tipe B
    - a. Menghadap ke luar pasar atau jalan sebesar Rp 4.000,00/ m<sup>2</sup>/tahun
    - b. Menghadap ke dalam pasar sebesar Rp 3.500,00/ m<sup>2</sup>/tahun
  - 3. Pasar tipe C
    - a. Menghadap ke luar pasar atau jalan sebesar Rp 3.000,00/ m<sup>2</sup>/tahun
    - b. Menghadap ke dalam pasar sebesar Rp 2.500,00/m<sup>2</sup>/tahun

4. Pasar tipe D
  - a. Menghadap ke luar pasar atau jalan sebesar Rp 2.000,00/m<sup>2</sup>/tahun
  - b. Menghadap ke dalam pasar sebesar Rp 1.500,00/ m<sup>2</sup>/tahun
- k. Biaya Balik Nama
  1. Orang Tua Kepada Anak Kandung sebesar 4 x 30 hari x retribusi
  2. Selain Orang Tua Kepada Anak Kandung sebesar 8 x 30 hari x retribusi

#### 6. Sistem Pemungutan Retribusi Pasar

Sistem pemungutan retribusi pasar adalah *official assessment system*, yaitu pemungutan retribusi yang berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan (Suandy, 2002: 273).

### C. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumbangan dari pos retribusi pasar. Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat kita lihat dengan membandingkan realisasi penerimaan retribusi pasar dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dikalikan 100 % (Halim, 2004: 163).

## D. Efisiensi

### 1. Pengertian Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan antara masukan (input) sumber daya oleh suatu unit organisasi dengan keluaran (output) yang dihasilkan (Mardiasmo, 2002; 132).

Efisiensi menunjukkan keberhasilan dari segi besarnya sumber yang digunakan atau biaya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil kegiatan yang dijalankan (Lumbantoruan, 1992: 163).

### 2. Efisiensi Pemungutan Retribusi Pasar

Efisiensi Pendapatan Asli Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Halim, 2004: 134) atau mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak yang bersangkutan (Halim, 2004: 93).

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengertian efisiensi PAD dan efisiensi pajak, maka yang dimaksud dengan efisiensi pemungutan retribusi pasar yaitu menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima atau mengukur bagian dari hasil retribusi pasar yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan retribusi pasar. Efisiensi digunakan untuk melihat semua biaya yang dikeluarkan Kantor Pengelolaan Pasar Daerah

(KPPD) untuk memperoleh penerimaan retribusi pasar dengan realisasi penerimaan retribusi pasar yang diterima.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Pasar}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar}} \times 100\%$$

Selain mencakup biaya langsung, biaya pemungutan juga memperhitungkan biaya tidak langsung bagi Kantor Pengelolaan Pasar Daerah, dan mungkin juga mencakup biaya luar seperti biaya mematuhi retribusi bagi wajib retribusi, itikad baik masyarakat dan lain sebagainya (Halim, 2004: 134).

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%, sehingga semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik (Halim, 2004: 134).

## E. Efektivitas

### 1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *output* dengan *outcome* (Mardiasmo, 2002: 4).

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan (Lumbantoruan, 1992: 163).

### 2. Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan

dibandingkan dengan target yang ditetapkan ( Halim, 2004: 135) atau mengukur hasil pungut suatu pajak terhadap target yang ditetapkan (Halim, 2004: 93).

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengertian efektivitas PAD dan efektivitas pajak, maka yang dimaksud dengan efektivitas pemungutan retribusi pasar yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah daerah melalui KPPD dalam merealisasikan retribusi pasar yang direncanakan dengan target yang telah ditetapkan atau mengukur hasil penerimaan retribusi pasar terhadap target yang telah ditetapkan. Semakin besar penerimaan retribusi pasar yang dihasilkan terhadap target yang sudah ditentukan, maka semakin efektif proses kerja Kantor Pengelolaan Pasar Daerah.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PenerimaanRetribusi Pasar}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Pasar}} \times 100\%$$

Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%, sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan pemerintah daerah yang semakin baik (Halim, 2004: 135).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah studi kasus di Pemerintah Kabupaten Sleman. Studi kasus merupakan penelitian yang memusatkan pada suatu objek penelitian tertentu dimana hasil penelitian hanya terbatas pada objek yang diteliti.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### 1. Tempat Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) dan Kantor Pengelolaaan Pasar Daerah Kabupaten Sleman (KPPD).

##### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret - Mei 2007

#### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

##### 1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pengelolaan Pasar Daerah (KPPD).

## 2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah data Retribusi Pasar dan data Pendapatan Asli Daerah untuk tahun 2004 sampai dengan tahun 2006.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian, yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan staf BPKKD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Sleman. Dalam penelitian ini, teknik wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang retribusi pasar dan Pendapatan Asli Daerah.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **E. Data yang Dicari**

Data yang diperlukan atau data yang akan dicari dalam penelitian ini adalah:

1. Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.
2. Data Pendapatan Asli Daerah tahun 2004 - 2006
3. Data realisasi penerimaan retribusi pasar tahun 2004- 2006
4. Data biaya pemungutan retribusi pasar tahun 2004 - 2006

5. Data target penerimaan retribusi pasar tahun 2004 – 2006

**F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kuantitatif digunakan untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi pasar serta kontribusi retribusi pasar terhadap PAD di Kabupaten Sleman Tahun 2004-2006. Sedangkan teknik analisis data kualitatif digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Sleman Tahun 2004-2006.

1. Untuk mengetahui efisiensi pemungutan retribusi pasar diperlukan langkah - langkah sebagai berikut:
  - a. Mengumpulkan dan mengambil data biaya pemungutan retribusi pasar tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 di BPKKD Kabupaten Sleman.
  - b. Mengumpulkan dan mengambil data realisasi penerimaan retribusi pasar tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 di KPPD Kabupaten Sleman.
  - c. Menghitung efisiensi pemungutan retribusi pasar yaitu dengan memasukkan data biaya pemungutan retribusi pasar dan realisasi penerimaan retribusi pasar ke dalam rumus berikut:

Menurut Halim (2004: 134):

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Pasar}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar}} \times 100\%$$



Selain mencakup biaya langsung, biaya pemungutan juga memperhitungkan biaya tidak langsung bagi Kantor Pengelolaan Pasar Daerah, dan mungkin juga mencakup biaya luar seperti biaya mematuhi retribusi bagi wajib retribusi, itikad baik masyarakat dan lain sebagainya (Halim, 2004: 134).

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%, sehingga semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik (Halim, 2004: 134).

- d. Menyajikan hasil perhitungan ke dalam tabel Efisiensi Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Sleman seperti tabel berikut ini:

Tabel 1. Efisiensi Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Sleman Tahun 2004-2006

Tahun Anggaran	Biaya Pemungutan Retribusi Pasar	Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar	Efisiensi (%)
2004			
2005			
2006			
Rata-rata			

2. Untuk mengetahui efektivitas pemungutan retribusi pasar diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Mengumpulkan dan mengambil data realisasi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 di KPPD Kabupaten Sleman.

- b. Mengumpulkan dan mengambil data target penerimaan retribusi pasar pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 di KPPD Kabupaten Sleman.
- c. Menghitung efektivitas pemungutan retribusi pasar yaitu dengan memasukkan data realisasi penerimaan retribusi pasar dan target penerimaan retribusi pasar ke dalam rumus berikut:

Menurut Halim (2004: 135):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Pasar}} \times 100\%$$

Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%, sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan pemerintah daerah yang semakin baik (Halim, 2004: 135).

- d. Menyajikan hasil perhitungan ke dalam tabel Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Sleman seperti tabel berikut ini:

Tabel 2. Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Sleman Tahun 2004-2006

Tahun Anggaran	Target Penerimaan Retribusi Pasar	Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar	Efektivitas (%)
2004			
2005			
2006			
Rata-rata			

3. Untuk mengetahui kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Mengumpulkan dan mengambil data realisasi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 di KPPD Kabupaten Sleman.
  - b. Mengumpulkan dan mengambil data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 di BPKKD Kabupaten Sleman.
  - c. Menghitung kontribusi retribusi pasar terhadap PAD yaitu dengan memasukkan data realisasi penerimaan retribusi pasar dan realisasi PAD ke dalam rumus berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

- d. Menyajikan hasil perhitungan ke dalam tabel Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD di Kabupaten Sleman seperti tabel berikut ini:

Tabel 3. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD di Kabupaten Sleman Tahun 2004-2006

Tahun Anggaran	Realisasi Retribusi Pasar	PAD	Kontribusi (%)
2004			
2005			
2006			
Rata-rata			

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM KABUPATEN SLEMAN**

#### **A. Sejarah Kabupaten Sleman**

Berdasarkan Perda No. 12 Tahun 1998 tertanggal 19 Oktober 1998, menetapkan tanggal 15 Mei Tahun 1916 merupakan hari jadi Sleman. Disini perlu ditegaskan bahwa hari jadi Sleman adalah hari jadi Kabupaten Sleman, bukan hari jadi Pemerintah Kabupaten Dati II Sleman. Penegasan ini diperlukan mengingat keberadaan Kabupaten Sleman jauh sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai wujud lahirnya negara Indonesia modern, yang memunculkan Pemerintah Dati II Sleman.

Dalam perhitungan Almanak, hari jadi Kabupaten Sleman jatuh pada hari Senin Kliwon, tanggal 12 Rejeb tahun Je 1846 Wuku Wayang. Atas dasar perhitungan tersebut ditentukan surya sungkala (perhitungan tahun Masehi) Rasa Manunggal Hanggatra Negara yang memiliki arti Rasa = 6, Manunggal = 1, Hanggatra = 9, Negara = 1, sehingga terbaca tahun 1916. Sementara menurut perhitungan Jawa (Candra Sengkala) hari jadi Kabupaten Sleman adalah Anggana Catur Salira Tunggal yang berarti Anggana = 6, Catur = 4, Salira = 8, Tunggal = 1, sehingga terbaca tahun tertanggal 15 Mei 1916.

Penentuan hari jadi Kabupaten Sleman dilakukan melalui penelaahan berbagai materi dari berbagai sumber informasi dan fakta sejarah. Adapun dasar-dasar pertimbangan yang digunakan adalah usia penamaan yang paling tua. Keberadaan hari jadi Kabupaten Sleman memiliki arti penting bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk memantapkan jati diri, sebagai

landasan yang menjiwai gerak langkah ke masa depan. Penetapan hari jadi ini akan melengkap identitas yang saat ini dimiliki Kabupaten Sleman.

## **B. Keadaan Geografis**

### 1. Letak Wilayah

Secara geografis Kabupaten Sleman terletak diantara  $107^{\circ} 15' 03''$  dan  $107^{\circ} 29' 30''$  Bujur Timur,  $7^{\circ} 34' 51''$  dan  $7^{\circ} 47' 30''$  Lintang Selatan.

Batas wilayah Kabupaten Sleman sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali (Propinsi Jawa Tengah)

Sebelah Timur : Kabupaten Klaten (Propinsi Jawa Tengah)

Sebelah Selatan : Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul (Propinsi Jawa Tengah)

Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo (Propinsi DIY) dan Kabupaten Magelang (Propinsi Jawa Tengah)

### 2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 km<sup>2</sup> atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3.185,80 km<sup>2</sup>, dengan jarak terjauh Utara-Selatan 32 km, Timur-Barat 35 km. Secara administratif Kabupaten Sleman terdiri dari 17 wilayah kecamatan, 86 desa dan 1.212 dusun. Pasar di Kabupaten Sleman berjumlah 36 pasar dan tersebar di 17 kecamatan.

Tabel4. Pembagian Wilayah Administrasi dan Pasar di Kabupaten Sleman

No	Kecamatan	Banyaknya		Luas Km <sup>2</sup>	Nama Pasar
		Desa	Dusun		
1.	Kec. Moyudan	4	65	27,62	1. Ngijon
2.	Kec. Godean	7	57	26,84	2. Godean
3.	Kec. Minggir	5	68	27,27	3. Balangan 4. Kebon Agung
4.	Kec. Gamping	5	59	29,25	5. Gamping
5.	Kec. Seyegan	5	67	26,63	6. Ngino
6.	Kec. Sleman	5	83	31,32	7. Sleman 8. Deggung 9. Medari
7.	Kec. Ngaglik	6	87	38,52	10. Gentan 11. Setum 12. Monjali
8.	Kec. Mlati	5	74	28,52	13. Cebongan
9.	Kec. Tempel	8	98	32,49	14. Tempel 15. Ps. Hewan Tempel 16. Gendol
10.	Kec. Turi	4	54	43,09	17. Turi 18. Ngablak
11.	Kec. Prambanan	6	68	41,35	19. Prambanan 20. Ps.HewanPrambanan 21. Potrojayan 22. Kenaran
12.	Kec. Kalasan	4	80	35,84	23. Salakan 24. Kalasan
13.	Kec. Berbah	4	58	22,99	25. Tegal Sari
14.	Kec. Ngemplak	5	82	35,71	26. Kejambon 27. Jangkang 28. Wonosari
15.	Kec. Pakem	5	61	43,84	29. Pakem 30. Ps. Hewan Pakem 31. Srowolan
16.	Kec. Depok	3	58	35,55	32. Sambilegi 33. Condong Catur 34. Sardjito
17.	Kec. Cangkringan	5	73	47,99	35. Bronggang 36. Pucung
		86	1.212	574,82	

Sumber: Badan Pusat Statistik dan KPPD Kabupaten Sleman

### 3. Topografi

Kabupaten Sleman keadaan tanahnya dibagian selatan relatif datar kecuali daerah perbukitan tenggara Kecamatan Prambanan dan sebagian di Kecamatan Gamping. Semakin ke utara relatif miring dan di bagian utara sekitar lereng Merapi relatif terjal serta terdapat sekitar 100 sumber mata air. Hampir setengah dari luas wilayah Kabupaten Sleman merupakan tanah pertanian yang subur dengan didukung irigasi teknis di bagian barat dan selatan. Ketinggian wilayah Kabupaten Sleman berkisar antara <100 sampai dengan >1000 m dari permukaan laut. Ketinggian tanahnya dapat dibagi menjadi 4 kelas yaitu ketinggian <100 m, 100-499 m, 500-999 m, dan >1000 dari permukaan laut. Wilayah Kabupaten Sleman termasuk beriklim tropis basah dengan musim hujan antara bulan November-April dan musim kemarau antara bulan Mei-Oktober.

#### C. Karakteristik Wilayah

1. Berdasarkan karakteristik sumberdaya yang ada, wilayah Kabupaten Sleman terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu :
  - a. Kawasan lereng Gunung Merapi, dimulai dari jalan yang menghubungkan kota Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan (*ringbelt*) sampai dengan puncak Gunung Merapi. Wilayah ini merupakan sumber daya air dan ekowisata yang berorientasi pada kegiatan Gunung Merapi dan ekosistemnya.
  - b. Kawasan Timur yang meliputi Kecamatan Prambanan, sebagian Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Berbah. Wilayah ini merupakan

tempat peninggalan purbakala (candi) yang merupakan pusat wisata budaya dan daerah lahan kering serta sumber bahan batu putih.

- c. Wilayah Tengah yaitu wilayah aglomerasi kota Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok dan Gamping. Wilayah ini merupakan pusat pendidikan, perdagangan dan jasa.
  - d. Wilayah Barat meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan dan Moyudan merupakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia cukup air dan sumber bahan baku kegiatan industri kerajinan mendong, bambu serta gerabah.
2. Berdasarkan jalur lintas antar daerah, kondisi wilayah Kabupaten Sleman dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan Sleman dengan kota pelabuhan (Semarang, Surabaya, Jakarta). Jalur ini melewati wilayah Kecamatan Prambanan, Kalasan, Depok, Mlati, dan Gamping. Selain itu, wilayah Kecamatan Depok, Mlati dan Gamping juga dilalui jalan lingkar yang merupakan jalan arteri primer. Untuk wilayah-wilayah kecamatan merupakan wilayah yang cepat berkembang, yaitu dari pertanian menjadi industri, perdagangan dan jasa.
  3. Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah hulu kota Yogyakarta. Berdasar letak kota dan mobilitas kegiatan masyarakat, dapat dibedakan fungsi kota sebagai berikut :



- a. Wilayah aglomerasi (perkembangan kota dalam kawasan tertentu). Karena perkembangan kota Yogyakarta, maka kota-kota yang berbatasan dengan kota Yogyakarta yaitu Kecamatan Depok, Gamping serta sebagian wilayah Kecamatan Ngaglik dan Mlati merupakan wilayah aglomerasi kota Yogyakarta.
- b. Wilayah sub urban (wilayah perbatasan antar desa dan kota). Kota Kecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik terletak agak jauh dari kota Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan atau arah kegiatan masyarakat di wilayah kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan dan merupakan wilayah sub urban.
- c. Wilayah fungsi khusus atau wilayah penyangga (*buffer zone*). Kota Kecamatan Tempel, Pakem dan Prambanan merupakan kota pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya dan merupakan pendukung dan batas perkembangan kota ditinjau dari kota Yogyakarta.

#### **D. Keadaan Penduduk**

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sleman, jumlah penduduk Sleman pada pertengahan tahun 2006 tercatat sebesar 910.586 jiwa yang terdiri 451.194 laki-laki dan 459.392 perempuan. Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Sleman pada pertengahan tahun 2006 tercatat 1.584 jiwa per km<sup>2</sup>.

Beberapa kecamatan yang relatif padat penduduknya adalah Depok, Mlati, Gamping dan Godean dengan kepadatan masing-masing mencapai 3.365 jiwa, 2.553 jiwa, 2.513 jiwa, 2.264 jiwa per km<sup>2</sup>. Sedangkan daerah di Kabupaten Sleman yang memiliki kepadatan penduduk relatif rendah adalah Kecamatan

Cangkringan yang merupakan kecamatan terluas tetapi jumlah penduduk paling sedikit di Kabupaten Sleman yaitu 577 jiwa per km<sup>2</sup>. Demikian pula dengan Kecamatan Pakem dan Turi yang memiliki kepadatan 784 jiwa per km<sup>2</sup> dan 800 jiwa per km<sup>2</sup> (BPS, 2006).

Tabel5. Luas Wilayah, Banyaknya Penduduk, Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman, Pertengahan Tahun 2006

Kecamatan	Luas Km <sup>2</sup>	Jenis Kelamin		Jumlah	Kepadatan per Km <sup>2</sup>
		Lk	Pr		
1. Moyudan	27,62	17.013	17.736	34.749	1.258
2. Minggir	27,27	17.152	18.176	35.328	1.259
3. Seyegan	26,63	21.204	22.232	43.436	1.631
4. Godean	26,84	30.261	30.507	60.768	2.264
5. Gamping	29,25	36.645	36.882	73.527	2.513
6. Mlati	28,52	36.596	36.232	72.828	2.553
7. Depok	35,55	61.905	57.731	119.636	3.365
8. Berbah	22,99	20.909	21.719	42.628	1.854
9. Prambanan	41,35	21.531	23.726	45.257	1.094
10. Kalasan	35,84	27.885	29.453	57.338	1.599
11. Ngemplak	35,71	23.697	24.849	48.546	1.359
12. Ngaglik	38,52	36.597	37.068	73.665	1.912
13. Sleman	31,32	29.477	30.100	59.577	1.902
14. Tempel	32,49	23.923	24.340	48.263	1.485
15. Turi	43,09	17.030	17.477	34.507	800
16. Pakem	43,84	15.969	16.838	32.807	748
17. Cangkringan	47,99	13.400	14.326	27.726	577
Jumlah	574,82	451.194	459.392	910.586	1.584

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman

## E. Sosial

### 1. Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam pengembangan sumber daya manusia. Kemajuan suatu bangsa banyak ditentukan oleh kualitas pendidikan penduduknya. Pada jenjang SD, Kabupaten Sleman pada tahun

2005/2006 memiliki sebanyak 503 unit sekolah yang terdiri dari 498 SD negeri dan 111 SD swasta dengan jumlah kelas masing-masing sebanyak 2.594 kelas untuk SD negeri dan 776 kelas untuk SD swasta. Banyaknya guru SD mencapai 4.081 orang di SD negeri dan 1.259 orang di SD swasta. Adapun peserta didik yang sedang mengenyam pendidikan tercatat sebanyak 85.088 anak yang terbagi menjadi 63.548 anak bersekolah di SD negeri dan 21.540 anak di SD swasta.

Pada jenjang SMP, jumlah sekolah tercatat sebanyak 102 sekolah, yang terdiri 54 SMP negeri dan 48 SMP swasta dengan menyediakan kelas masing-masing sebanyak 664 kelas untuk SMP negeri dan 237 kelas untuk SMP swasta. Banyaknya guru yang mengajar di SMP tercatat sebanyak 2.939 orang. Sebagian besar dari mereka 2.024 orang mengajar di SMP negeri, sedangkan selebihnya di SMP swasta. Adapun murid yang bersekolah di SMP pada tahun 2005/2006 mencapai 31.914 orang yang terdiri dari 25.664 orang di SMP negeri dan SMP swasta sebanyak 6.250 orang.

Untuk jenjang yang lebih tinggi yaitu SMU, tersedia sebanyak 50 sekolah dengan 17 SMU negeri dan 33 SMU swasta. SMU negeri memiliki jumlah kelas sebanyak 223 kelas, sedangkan SMU swasta 175 kelas. Banyaknya guru di SMU negeri 737 orang dan guru di SMU swasta 781 orang, dengan murid di SMU negeri sebanyak 8.364 orang dan di SMU swasta sebanyak 4.031 orang. Untuk jenjang pendidikan menengah lainnya yaitu SMK, terdapat sebanyak 46 SMK swasta dan 38 SMK

negeri. Banyaknya guru SMK swasta yaitu 1.134 orang dan guru SMK negeri 980 orang. Murid yang memilih sekolah di SMK tercatat sebanyak 9.271 orang di SMK swasta dan 5.837 di SMK negeri. Pada jenjang Perguruan Tinggi, jumlah Perguruan Tinggi di Kabupaten Sleman tercatat sebanyak 5 Perguruan Tinggi negeri dan 30 Perguruan Tinggi swasta yang keduanya terdiri dari universitas, institut, sekolah tinggi, akademi dan politeknik (BPS, 2005).

## 2. Agama

Kerukunan kehidupan intern umat dan antar umat beragama di Kabupaten Sleman dalam kondisi baik dan terkendali, toleransi antar umat beragama dan rasa kegotongroyongan di antara umat di Kabupaten Sleman, menjadi salah satu kunci kestabilan dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Sleman.

Tabel6. Banyaknya Pemeluk Agama Menurut Jenisnya di Kabupaten Sleman Tahun 2005

No	Kecamatan	Pemeluk Agama					Jumlah
		Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	
1.	Moyudan	29.375	5.015	525	-	1	34.916
2.	Minggir	27.175	8.025	1.098	13	10	36.321
3.	Seyegan	43.827	1.075	154	47	2	45.105
4.	Godean	69.643	3.482	3.742	68	40	76.966
5.	Gamping	66.639	4.734	3.057	67	30	74.527
6.	Mlati	63.730	5.237	2.894	201	148	72.210
7.	Depok	108.481	6.811	5.820	509	386	122.007
8.	Berbah	38.662	2.300	2.255	40	30	43.287
9.	Prambanan	42.868	2.851	345	45	-	46.109
10.	Kalasan	54.539	2.321	868	118	24	57.870
11.	Ngemplak	45.787	2.618	946	66	83	49.500
12.	Ngaglik	62.635	4.282	1.813	135	58	68.923
13.	Sleman	54.725	3.451	575	18	9	58.778
14.	Tempel	48.875	1.273	186	29	16	50.379

15.	Turi	32.382	3.396	110	11	-	35.899
16.	Pakem	27.609	4.096	800	6	15	32.526
17.	Cangkringan	28.327	218	171	5	-	28.721
	Jumlah	845.270	61.185	25.359	1.378	852	934.044

Sumber: Departemen Agama Kabupaten Sleman

## F. Pemerintahan

Pemerintahan Kabupaten Sleman dipimpin oleh seorang Bupati dan Wakil Bupati. Jumlah pegawai instansi otonom pada tahun 2005 sebanyak 12.131 orang yang terdiri dari 5767 perempuan dan 6364 laki-laki.

Latar belakang pendidikan PNS terdiri dari Diploma IV - S2 sebanyak 4019 orang, Diploma I - Diploma III sebanyak 4060 orang, SMU sejumlah 3298 orang, SMP sebanyak 458 orang, SD sebanyak 280 orang.

Tabel 7. Banyaknya Pegawai Pemerintah Daerah Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman, 2005

No.	Instansi	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	BKD	47	26	73
2	Bawasda	33	26	59
3	BPKKD	58	72	130
4	BPPD	32	14	46
5	Bappeda	46	29	75
6	BLK	79	17	96
7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	44	25	69
8	Dinas Kesehatan	57	63	120
9	Dinas Pendidikan	4091	4684	8775
10	Dinas P3BA	249	14	263
11	Dinas P2KPM	76	34	110
12	Dinas Kimpraswilhub	228	23	251
13	Dinas Pertanian dan Kehutanan	305	97	402
14	Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat	83	36	119
15	Dinas Tenaga Kerja, Sosial, Dan Keluarga Berencana	104	99	203
16	Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil	23	12	35

17	Kantor Pengelolaan Pasar Daerah	55	6	61
18	Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan	24	10	34
19	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	17	22	39
20	Kantor Telekomunikasi dan Informatika	16	14	30
21	Sekretariat Daerah	154	91	245
22	Sekretariat DPRD	22	18	40
23	RSUD	74	151	225
24	Kec. Moyudan	24	7	31
25	Kec. Minggir	21	11	32
26	Kec. Seyegan	24	14	38
27	Kec. Godean	27	14	41
28	Kec. Gamping	31	10	41
29	Kec. Mlati	30	14	44
30	Kec. Depok	36	10	46
31	Kec. Berbah	30	5	35
32	Kec. Prambanan	27	10	37
33	Kec. Kalasan	26	13	39
34	Kec. Ngemplak	22	10	32
35	Kec. Ngaglik	25	15	40
36	Kec. Sleman	26	16	42
37	Kec. Tempel	28	11	39
38	Kec. Turi	24	6	30
39	Kec. Pakem	26	14	40
40	Kec. Cangkringan	20	4	24
		6364	5767	12131

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman

Tabel 8. Banyaknya Pegawai Pemerintah Daerah menurut Instansi dan Pendidikan di Kabupaten Sleman, 2005

No	Instansi	SD	SMP	SMU	DI-III	DIV-S2	Jumlah
1	BKD	2	0	25	4	42	73
2	Bawasda	1	2	14	4	38	59
3	BPKKD	1	6	52	16	55	130
4	BPPD	0	3	17	2	24	46
5	Bappeda	1	0	18	3	53	75
6	BLK	2	6	30	9	33	96
7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0	2	20	12	35	69
8	Dinas Kesehatan	3	7	43	24	43	120
9	Dinas Pendidikan	107	180	1846	3676	2966	8775

10	Dinas P3BA	72	80	75	7	29	263
11	Dinas P2KPM	3	4	52	10	41	110
12	Dinas Kimpraswilhub	19	31	131	15	55	251
13	Dinas Pertanian dan Kehutanan	9	10	157	88	138	402
14	Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat	2	8	66	7	36	119
15	Dinas Tenaga Kerja, Sosial, Dan Keluarga Berencana	5	10	104	23	61	203
16	Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil	0	3	15	4	13	35
17	Kantor Pengelolaan Pasar Daerah	15	9	27	0	10	61
18	Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan	3	0	15	1	15	34
19	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	0	2	21	9	7	39
20	Kantor Telekomunikasi dan Informatika	1	1	13	6	9	30
21	Sekretariat Daerah	8	16	87	18	116	245
22	Sekretariat DPRD	3	5	13	3	16	40
23	RSUD	8	11	123	43	40	225
24	Kec. Moyudan	1	4	16	4	6	31
25	Kec. Minggir	0	5	18	4	5	32
26	Kec. Seyegan	2	3	16	6	11	38
27	Kec. Godean	1	3	24	4	9	41
28	Kec. Gamping	0	5	25	5	6	41
29	Kec. Mlati	2	7	23	8	4	44
30	Kec. Depok	0	2	21	6	17	46
31	Kec. Berbah	1	2	21	6	5	35
32	Kec. Prambanan	1	3	18	2	13	37
33	Kec. Kalasan	0	2	22	5	10	39
34	Kec. Ngemplak	0	3	15	6	8	32
35	Kec. Ngaglik	2	5	14	3	16	40
36	Kec. Sleman	1	5	22	4	10	42
37	Kec. Tempel	2	5	26	3	3	39
38	Kec. Turi	1	1	14	7	7	30
39	Kec. Pakem	0	5	27	0	8	40
40	Kec. Cangkringan	1	2	12	3	6	24
		280	458	3298	4060	4019	12131

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman

## G. Perekonomian Kabupaten Sleman

Perekonomian Kabupaten Sleman selama lima tahun terakhir (2000-2005) kondisinya relatif baik dan stabil. Pada periode tersebut, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman relatif konsisten berkisar antara 4 sampai 5 persen. Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian di Kabupaten Sleman didominasi oleh empat sektor. Keempat sektor tersebut berturut-turut adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, jasa-jasa, industri pengolahan dan pertanian. Lebih dari 70 persen nilai tambah yang tercipta oleh kegiatan ekonomi di Kabupaten Sleman merupakan sumbangan dari empat sektor tersebut. Lima sektor lainnya memberikan sumbangan kurang dari 30 persen dari total nilai tambah yang tercipta di Kabupaten Sleman (PDRB, 2000-2005).

Tabel 9. Distribusi Sektor Unggulan bagi Perekonomian Kabupaten Sleman Tahun 2003-2005 (persen)

Sektor	2003	2004	2005
a. Pertanian	15,97	15,07	14,71
b. Industri pengolahan	16,70	16,28	15,89
c. Perdagangan, hotel dan restoran	21,19	21,07	21,75
d. Jasa-jasa	19,42	19,80	19,14
e. Lainnya (Pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air bersih, bangunan, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan)	26,72	27,78	28,51

Sumber: BPS Kabupaten Sleman

## H. Proses Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Sleman

1. Setiap hari, petugas memungut retribusi pasar dari semua pedagang yang menjadi Wajib Retribusi dengan membawa kartu retribusi.



2. Berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), petugas menagih dan memungut retribusi pasar kepada pedagang sebagai Wajib Retribusi sesuai dengan besarnya retribusi pasar yang terutang.
3. Setelah Wajib Retribusi membayar retribusi pasar, maka petugas akan memberi karcis sebagai tanda bukti pembayaran retribusi pasar.
4. Petugas menghitung penerimaan retribusi pasar dari karcis yang telah habis dan berdasarkan kartu retribusi. Kemudian dicatat dalam buku kendali.
5. Dalam satu hari seluruh hasil pemungutan retribusi pasar dikumpulkan kepada bendahara pasar. Dari bendahara pasar, hasil pemungutan retribusi pasar tersebut disetorkan ke kas daerah melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD).

**BAB V**  
**ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

**A. Deskripsi Data**

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Sleman ini adalah untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi pasar serta kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006. Data utama yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data realisasi dan target penerimaan retribusi pasar, data biaya pemungutan retribusi pasar dan data realisasi dan target PAD. Data yang diperoleh dari BPKKD dan KPPD Kabupaten Sleman mengenai target dan realisasi PAD, target dan realisasi retribusi pasar, serta biaya pemungutan retribusi pasar tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Target dan Realisasi PAD Kab. Sleman  
Tahun 2004-2006 (Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi
2004	53.919.261.011	70.499.050.997
2005	66.511.686.403	77.904.742.688
2006	75.792.320.330	86.640.745.947

Sumber: BPKKD Kab. Sleman

Tabel 11. Uraian Realisasi Penerimaan dan Target Retribusi Pasar Kab. Sleman Tahun 2004-2006 (Rupiah)

Tahun	Uraian Realisasi Penerimaan				Total Retribusi	
	Retribusi Pasar	Retribusi Ijin Los, Kios, Bango	Retribusi Lerepan	Retribusi MCK	Realisasi	Target
2004	1.873.318.200	113.769.160	55.952.250	55.522.000	2.095.561.610	2.256.000.000
2005	2.037.000.000	132.324.000	56.978.000	59.071.500	2.344.681.850	2.300.000.000
2006	2.147.982.700	157.528.000	63.057.400	65.181.000	2.433.749.100	2.600.000.000

Sumber: KPPD Kab. Sleman

Tabel 12. Biaya Pemungutan Retribusi Pasar Kabupaten Sleman  
Tahun 2004- 2006 (Rupiah)

No.	Keterangan Biaya	Tahun		
		2004	2005	2006
<b>A.</b>	<b>Biaya Tidak Langsung</b>			
1.	Biaya Gaji, Tunjangan dan Incentif.	616.108.286	1.131.829.336	1.294.573.626
2.	Biaya Barang dan Jasa	822.980.120	974.624.444	1.361.004.122
3.	Biaya Perjalanan Dinas	6.125.000	5.195.000	40.806.600
4.	Biaya Pemeliharaan	6.121.850	4.793.000	20.950.000
<b>B.</b>	<b>Biaya Langsung</b>			
5.	Program Peningkatan SDM Pedagang Pasar	32.381.000	39.665.750	46.525.000
6.	Program Ketatausahaan	-	19.516.500	-
7.	Program Peningkatan Pelayanan Pedagang Pasar	228.730.150	290.309.250	507.631.800
8.	Program Kelengkapan Sarana Prasarana Pasar	20.000.000	120.799.500	37.190.000
	<b>Total</b>	<b>1.732.446.406</b>	<b>2.586.732.780</b>	<b>3.308.681.148</b>

Sumber: BPKKD dan KPPD Kab. Sleman

## **B. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar Kabupaten Sleman**

### **1. Analisis Efisiensi Pemungutan Retribusi Pasar**

Efisiensi retribusi pasar mengukur bagian dari hasil retribusi pasar yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan retribusi pasar. Efisiensi digunakan untuk melihat semua biaya yang dikeluarkan Kantor Pengelolaan Pasar Daerah (KPPD) untuk memperoleh

penerimaan retribusi pasar dengan realisasi penerimaan retribusi pasar yang diterima.

Belanja atau biaya adalah penurunan aktiva atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan dalam suatu periode akuntansi atau periode anggaran tertentu ( Bastian, 2002: 53).

Untuk mengetahui efisiensi pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Sleman selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 digunakan rumus sebagai berikut:

Menurut Halim (2004: 134):

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Pasar}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar}} \times 100\%$$

Selain mencakup biaya langsung, biaya pemungutan juga memperhitungkan biaya tidak langsung bagi Kantor Pengelolaan Pasar Daerah, dan mungkin juga mencakup biaya luar seperti biaya mematuhi retribusi bagi wajib retribusi, itikad baik masyarakat dan lain sebagainya (Halim, 2004: 134).

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%, sehingga semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik (Halim, 2004: 134).

Perhitungan efisiensi pemungutan retribusi pasar adalah sebagai berikut:

Efisiensi Pemungutan Retribusi Pasar Tahun 2004

$$= \frac{1.732.446.406}{2.095.561.610} \times 100\%$$

$$= 82,67 \%$$

Efisiensi Pemungutan Retribusi Pasar Tahun 2005

$$= \frac{2.586.732.780}{2.344.681.850} \times 100\%$$

$$= 110,32 \%$$

Efisiensi Pemungutan Retribusi Pasar Tahun 2006

$$= \frac{3.308.681.148}{2.433.749.100} \times 100\%$$

$$= 135,95 \%$$

Secara jelas efisiensi pemungutan retribusi pasar ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 13. Efisiensi Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Sleman Tahun 2004-2006

Tahun	Biaya Pemungutan Retribusi Pasar (Rp)	Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar (Rp)	Efisiensi (%)
2004	1.732.446.406	2.095.561.610	82,67
2005	2.586.732.780	2.344.681.850	110,32
2006	3.308.681.148	2.433.749.100	135,95
Rata-rata			109,65

Sumber: BPKKD dan KPPD Kabupaten Sleman

Tabel di atas menunjukkan:

- a. Pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Sleman selama tahun 2004 sampai dengan 2006 cenderung berjalan tidak efisien, yaitu berkisar antara 82,67% sampai 135,95% dengan rata-rata efisiensinya 109,65% atau di atas 100%. Walaupun selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 pemungutan retribusi pasar tidak efisien tetapi pada tahun 2004 efisiensinya di bawah 100% yang berarti pemungutan retribusi pasar efisien.
- b. Pada tahun 2004, efisiensi pemungutan retribusi pasar sebesar 82,67% atau kurang dari 100%, ini berarti bahwa pemungutan retribusi pasar sudah efisien. Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi pasar pada tahun 2004 sebesar 82,67% dari penerimaan retribusi pasar pada tahun tersebut.
- c. Pada tahun 2005, efisiensi pemungutan retribusi pasar sebesar 110,32% atau lebih dari 100%, ini berarti bahwa pemungutan retribusi pasar tidak efisien. Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi pasar pada tahun 2005 sebesar 110,32% dari penerimaan retribusi pasar pada tahun tersebut.
- d. Pada tahun 2006, efisiensi pemungutan retribusi pasar sebesar 135,95% atau lebih dari 100%, ini berarti bahwa pemungutan retribusi pasar tidak efisien. Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi pasar pada tahun 2006 sebesar 135,95% dari penerimaan retribusi pasar pada tahun tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag TU KPPD diperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pemungutan retribusi pasar tidak efisien yaitu:

- a. Biaya untuk pemungutan retribusi pasar yang selalu meningkat sehingga lebih besar dari penerimaannya, terutama untuk biaya pegawai dan biaya jasa tenaga non PNS yang termasuk dalam biaya barang dan jasa, hal ini disebabkan karena sejak KPPD terbentuk, gaji dan tunjangan bagi pegawai di KPPD semua ditanggung oleh KPPD yang sebelumnya diambilkan dari anggaran Dinas Perekonomian dan adanya kenaikan tunjangan sebagai pengganti insentif pada tahun 2006.
- b. Program Kantor Pengelolaan Pasar Daerah yang meliputi peningkatan pelayanan pedagang pasar, perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana pasar.

## **2. Analisis Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar**

Analisis ini digunakan untuk mengukur hasil penerimaan retribusi pasar terhadap target yang telah ditetapkan. Semakin besar penerimaan retribusi pasar yang dihasilkan terhadap target yang sudah ditentukan, maka semakin efektif proses kerja Kantor Pengelolaan Pasar Daerah.

Untuk mengetahui efektivitas pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Sleman selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 digunakan rumus sebagai berikut:



Menurut Halim (2004: 135):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Pasar}} \times 100\%$$

Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%, sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan pemerintah daerah yang semakin baik (Halim, 2004: 135).

Perhitungan efektivitas pemungutan retribusi pasar adalah sebagai berikut:

Efektivitas pemungutan retribusi pasar tahun 2004

$$\begin{aligned} &= \frac{2.095.561.610}{2.256.000.000} \times 100\% \\ &= 92,89\% \end{aligned}$$

Efektivitas pemungutan retribusi pasar tahun 2005

$$\begin{aligned} &= \frac{2.344.681.850}{2.300.000.000} \times 100\% \\ &= 101,94\% \end{aligned}$$

Efektivitas pemungutan retribusi pasar tahun 2006

$$\begin{aligned} &= \frac{2.433.749.100}{2.600.000.000} \times 100\% \\ &= 93,61\% \end{aligned}$$

Secara jelas efektivitas pemungutan retribusi pasar ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 14. Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Sleman Tahun 2004-2006

Tahun	Target Penerimaan Retribusi Pasar (Rp)	Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar (Rp)	Efektivitas (%)
2004	2.256.000.000	2.095.561.610	92,89
2005	2.300.000.000	2.344.681.850	101,94
2006	2.600.000.000	2.433.749.100	93,61
Rata-rata			96,15

Sumber: KPPD Kabupaten Sleman

Tabel di atas menunjukkan:

- a. Pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Sleman selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 secara keseluruhan tidak dapat dikatakan efektif yaitu berkisar antara 92,89% sampai 101,94% dengan rata-rata efektivitasnya 96,15% atau kurang dari 100%. Walaupun selama tahun 2004 sampai tahun 2006 pemungutan retribusi pasar belum efektif, tetapi pada tahun 2005 efektivitasnya di atas 100% yang berarti pemungutan retribusi pasar sudah efektif.
- b. Pada tahun 2004, efektivitas pemungutan retribusi pasar mencapai 92,89%. Pada tahun ini penerimaan retribusi pasar ditargetkan sebesar Rp 2.256.000.000,- sementara yang terealisasi sebesar Rp 2.095.561.610,-. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut terdapat penurunan penerimaan retribusi pasar sebesar Rp 160.438.390,- atau 7,11% dari jumlah penerimaan yang

ditargetkan pada tahun tersebut dan pemungutannya tidak efektif karena kurang dari 100%.

- c. Pada tahun 2005 efektivitas mencapai 101,94%. Pada tahun ini penerimaan retribusi pasar ditargetkan sebesar Rp 2.300.000.000,- sementara yang terealisasi sebesar Rp 2.344.681.850,-. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut terdapat kelebihan penerimaan retribusi pasar sebesar Rp 44.681.850,- atau 1,94% dari jumlah penerimaan yang ditargetkan pada tahun tersebut dan pemungutannya sudah efektif karena melebihi 100%.
- d. Pada tahun 2006 efektivitasnya mencapai 93,61%. Pada tahun ini penerimaan retribusi pasar ditargetkan sebesar Rp 2.600.000.000,- sementara yang terealisasi sebesar Rp 2.433.749.100,-. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut terdapat penurunan penerimaan retribusi pasar sebesar Rp 166.250.900,- atau 6,39% dari jumlah penerimaan yang ditargetkan pada tahun tersebut dan pemungutannya tidak efektif karena kurang dari 100%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag TU KPPD diperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pemungutan retribusi pasar tidak efektif yaitu:

- a. Penetapan target yang terlalu tinggi dan belum memperhitungkan tingkat resiko tidak terpungutnya retribusi pasar.

- b. Kesadaran yang kurang dari pedagang untuk membayar retribusi pasar secara penuh.
- c. Petugas yang ditunjuk melaksanakan pemungutan retribusi pasar tidak bertindak tegas terhadap para pedagang yang tidak membayar retribusi pasar secara penuh.
- d. Kurangnya SDM di KPPD Sleman yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan pemungutan retribusi pasar di seluruh pasar yang ada di Kabupaten Sleman.
- e. Sarana dan prasarana yang digunakan untuk pemungutan retribusi pasar belum memadai.

### **C. Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD Kabupaten Sleman**

Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumbangan dari pos retribusi pasar.

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Perhitungan kontribusi retribusi pasar terhadap PAD Kabupaten Sleman selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 adalah sebagai berikut:

Kontribusi retribusi pasar tahun 2004:

$$= \frac{2.095.561.610}{70.499.050.997} \times 100\%$$

$$= 2,97\%$$

Kontribusi retribusi pasar tahun 2005:

$$= \frac{2.344.681.850}{77.904.742.688} \times 100\%$$

$$= 3,01\%$$

Kontribusi retribusi pasar tahun 2006:

$$= \frac{2.433.749.100}{86.640.745.947} \times 100\%$$

$$= 2,81\%$$

Secara jelas kontribusi retribusi pasar terhadap PAD ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 15. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD di Kabupaten Sleman Tahun 2004-2006

Tahun	Realisasi Retribusi Pasar (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2004	2.095.561.610	70.499.050.997	2,97
2005	2.344.681.850	77.904.742.688	3,01
2006	2.433.749.100	86.640.745.947	2,81
Rata-rata			2,93

Sumber: BPKKD dan KPPD Kabupaten Sleman

Dari tabel 5.3 dapat diketahui bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah setiap tahun mengalami fluktuasi yaitu dari tahun 2004 sebesar 2,97%, tahun 2005 mengalami kenaikan menjadi 3,01%,

selanjutnya pada tahun 2006 mengalami penurunan menjadi 2,81%. Rata-rata kontribusi selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 sebesar 2,93%. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2005 dengan kontribusi sebesar 3,01% dan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2006 dengan kontribusi sebesar 2,81%.

- a. Pada tahun 2004, retribusi pasar memberikan kontribusi sebesar 2,97% terhadap PAD. Seiring dengan adanya peningkatan realisasi retribusi pasar pada tahun 2005, kontribusi juga mengalami peningkatan sebesar 0,04% yaitu dari 2,97% menjadi 3,01%.
- b. Pada tahun 2006, retribusi pasar mengalami peningkatan dalam realisasinya, namun kontribusi yang diberikan mengalami penurunan bahkan merupakan kontribusi terkecil selama 3 tahun terakhir. Kontribusi yang diberikan pada tahun 2006 sebesar 2,81% atau mengalami penurunan 0,2% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan peningkatan realisasi penerimaan retribusi pasar lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. a. Efisiensi pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Sleman pada tahun 2004 sebesar 82,67%, tahun 2005 sebesar 110,32%, tahun 2006 sebesar 135,95% dengan rata-rata efisiensi sebesar 109,65% per tahunnya. Dengan demikian pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Sleman selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 berjalan tidak efisien, karena rata-rata efisiensinya di atas 100%.  
b. Efektivitas pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Sleman pada tahun 2004 sebesar 92,89%, tahun 2005 sebesar 101,94%, tahun 2006 sebesar 93,61% dengan rata-rata efektivitas sebesar 96,15% per tahunnya. Dengan demikian pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Sleman selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 tidak efektif, karena rata-rata efektivitasnya di bawah 100%.
2. Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD pada tahun 2004 sebesar 2,97%, tahun 2005 sebesar 3,01%, tahun 2006 sebesar 2,81% dengan rata-rata kontribusi sebesar 2,93%, ini berarti bahwa penerimaan PAD sebesar 2,93% merupakan sumbangan dari retribusi pasar. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2005 dengan kontribusi sebesar 3,01% dan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2006 dengan kontribusi sebesar 2,81%.

## **B. Keterbatasan Penelitian**

1. Tidak adanya ukuran yang pasti mengenai batasan efisiensi, sehingga penulis hanya dapat menarik kesimpulan berdasarkan pendapat Halim (2004: 134) bahwa batasan efisiensi kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%, semakin kecil efisiensinya berarti menggambarkan kemampuan daerah dalam melakukan pemungutan yang semakin baik.
2. Untuk menentukan efektivitas pemungutan retribusi pasar, penulis menggunakan asumsi Halim (2004: 135), yaitu batasan efektivitas jika mencapai minimal 1 (satu) atau 100%. Hal ini disebabkan karena tidak ada rasio khusus untuk mengukur efektivitas yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Sleman.

## **C. Saran**

Setelah melakukan penelitian di BPKKD dan KPPD Kabupaten Sleman, maka penulis memberikan saran yang sekiranya bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar.

Saran yang diberikan penulis antara lain:

1. Bagi pemerintah daerah, agar menetapkan standar efisiensi dan efektivitas yang jelas dan pasti menurut Peraturan Daerah yang sudah disahkan sebelumnya, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dapat menilai kinerja daerahnya dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar untuk dapat meningkatkan penerimaan daerahnya.



2. Melakukan penghematan biaya pemungutan retribusi pasar serta mempertimbangkan program yang akan dilaksanakan sehingga memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
3. Pemerintah daerah harus menetapkan target secara realistis supaya tidak menetapkannya terlalu tinggi, sekaligus memperhitungkan tingkat risiko tidak terpungutnya retribusi pasar.
4. Pemberian sanksi yang tegas kepada para pedagang yang tidak membayar retribusi pasar secara penuh.
5. Menambah SDM di KPPD untuk membantu dalam pelaksanaan pemungutan yang tertib sehingga dapat turut serta meningkatkan penerimaan retribusi pasar.
6. Menambah sarana dan prasarana yang digunakan untuk memperlancar kegiatan pemungutan retribusi pasar, seperti alat angkutan darat.
7. Menciptakan pasar yang bersih, tertib dan nyaman sehingga dapat mempengaruhi minat pedagang untuk berjualan di pasar sekaligus mempengaruhi minat pengunjung untuk berbelanja di pasar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. (2002). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_, (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Bastian, Indra. (2002). *Sistem Akuntansi Sektor Publik* . Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Lumbantoruan, Magdalena. (1992). *Ensiklopedi Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik* . Yogyakarta: Andi.
- \_\_\_\_\_, (2003). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 9 Tahun 2001 *Tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten*.
- Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta* . (2004). Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Panduan Penulisan dan Ujian Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta* . (2007). Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.
- \_\_\_\_\_, (2004). Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Richard, dan Wirawan B Ilyas. 2004. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Riduansyah, Mohammad. (2003). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Makara Sosial Humaniora* . Vol. 7. No. 2. Desember. hal 49-57.

Soewondo. (1986). *Pajak dan Retribusi Daerah* . Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Suandy, Early. (2002). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Tim KPPD. (2005). *Profil Pasar Kabupaten*. Yogyakarta: Kantor Pengelolaan Pasar Daerah (KPPD) Kabupaten Sleman.

# LAMPIRAN

## WAWANCARA

1. Biaya apa saja yang termasuk dalam komponen biaya pemungutan retribusi pasar?
2. Apakah komposisi jenis biaya pemungutan retribusi pasar sebelum dan sesudah KPPD dibentuk itu sama?
3. Apakah komposisi jenis pendapatan retribusi pasar sebelum dan sesudah KPPD dibentuk itu sama?
4. Tarif izin tempat dasaran berdasar hari ataukah tahun?  
Perda No.9 tahun 2001 tentang pengelolaan pasar kabupaten atau SK. Bupati No. 1 tahun 2004 tentang perubahan tarif retribusi pasar?  
Menurut Perda ataukah menurut SK Bupati?
5. Siapakah yang melaksanakan pemungutan retribusi pasar?
6. Kepada siapa hasil pemungutan retribusi pasar diserahkan?
7. Siapakah yang menetapkan target retribusi pasar di Kabupaten Sleman?
8. Berdasarkan apa penetapan target retribusi pasar di Kabupaten Sleman?
9. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kenaikan biaya pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Sleman dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006?
10. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan realisasi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Sleman tidak dapat mencapai target?
11. Upaya apa yang dilakukan KPPD untuk menaikkan penerimaan retribusi pasar?

**BIAYA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR KABUPATEN SLEMAN**  
**Tahun 2004-2006**

		2004	2005	2006
	<b>BIAYA TIDAK LANGSUNG</b>			
<b>1</b>	<b>BIAYA PEGAWAI</b>			
1.1	Gaji dan tunjangan pegawai	<b>616,108,286</b>	<b>1,131,829,336</b>	<b>1,294,573,626</b>
	a. Gaji dan tunjangan PNS	477,790,139	957,160,363	1,179,873,626
	b. Gaji dan Tunjangan Koordinator Pasar	18,000,000	20,375,000	40,250,000
	c. Tunjangan bendaharawan	-	-	52,920,000
	d. Honorarium tim/panitia	-	-	18,270,000
	e. Uang lembur harian	-	-	3,260,000
1.2	Gaji dan tunjangan pengelola anggaran	21,400,000	34,200,000	-
1.3	Incentif	98,918,147	120,093,973	-
<b>2</b>	<b>BIAYA BARANG DAN JASA</b>	<b>822,980,120</b>	<b>974,624,444</b>	<b>1,361,004,122</b>
2.1	Biaya habis pakai kantor			
	a. Biaya alat tulis	7,172,350	8,051,600	18,674,800
	b. Biaya perangko, materai, dan benda pos lainnya	1,262,500	1,200,000	2,400,000
	c. Biaya alat bantu kantor	-	-	4,164,500
	d. Biaya alat listrik dan elektronika	1,028,800	1,030,000	1,268,000
	e. Biaya peralatan kebersihan	-	954,600	-
	f. Biaya Bahan Material	-	-	49,940,055
2.2	Biaya Jasa Kantor			
	a. Biaya jasa tenaga non PNS	606,785,000	712,950,000	1,046,500,000
	b. Biaya listrik pasar	-	-	53,579,045
	c. Biaya surat kabar dan majalah	1,108,800	1,380,000	2,280,000

	d. Biaya telepon	1,242,095	1,252,689	2,108,052
	e. Biaya listrik	45,614,075	80,707,755	12,542,445
2.3	Biaya cetak dan penggandaan			
	a. Biaya cetak, foto copy dan jilid	127,575,000	127,395,800	118,136,550
2.4	Biaya Makanan dan Minuman Kantor			
	a. Biaya Makanan dan Minuman rapat	1,253,000	1,728,000	4,726,475
	b. Biaya Makanan dan Minuman lembur	-	-	2,179,200
	c. Biaya Makanan dan Minuman peninjauan	-	-	300,000
	d. Biaya Makanan dan Minuman tamu	115,500	350,000	405,000
	e. Biaya Makanan dan Minuman kantor	481,000	-	-
2.5	Biaya sewa			
	a. Biaya sewa tanah pasar	-	-	41,350,000
	b. Biaya sewa tempat	29,342,000	37,624,000	150,000
	c. Biaya sewa perlengkapan	-	-	300,000
<b>3</b>	<b>BIAYA PERJALANAN DINAS</b>	<b>6,125,000</b>	<b>5,195,000</b>	<b>40,806,600</b>
	a. Biaya perjalanan dinas dalam daerah	4,200,000	2,805,000	4,380,000
	b. Biaya perjalanan dinas luar daerah	1,925,000	2,390,000	36,426,600
<b>4</b>	<b>BIAYA PEMELIHARAAN</b>	<b>6,121,850</b>	<b>4,793,000</b>	<b>20,950,000</b>
	a. Biaya pemeliharaan alat kantor	2,661,350	2,000,000	4,000,000
	b. Biaya pemeliharaan alat angkutan	3,460,500	2,793,000	16,950,000
	<b>TOTAL</b>	<b>1,451,335,256</b>	<b>2,116,441,780</b>	<b>2,717,334,348</b>
	<b>BIAYA LANGSUNG</b>			
<b>5</b>	<b>PROGRAM KETATAUSAHAAN</b>			

5.1	a. Biaya pengelolaan kearsipan	-	19,516,500	-
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SDM DAN PEDAGANG PASAR</b>			
6.1	Biaya Pembinaan petugas dan pedagang pasar	32,381,000	39,665,750	46,525,000
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEDAGANG PASAR</b>	<b>228,730,150</b>	<b>290,309,250</b>	<b>507,631,800</b>
7.1	Biaya Intensifikasi retribusi pasar	17,982,500	23,964,000	20,006,000
7.2	Biaya Operasional pelayanan pedagang pasar	197,698,650	217,327,000	322,197,000
7.3	Biaya Penataan pedagang pasar	13,049,000	14,459,750	17,181,000
7.4	Biaya pembuatan database perijinan pasar	-	-	67,280,500
7.5	Biaya penyiapan bahan PERDA	-	-	9,360,000
7.6	Biaya pembinaan pasar desa	-	-	14,632,000
7.7	Biaya sosialisasi penjangkaran Pasar Pakem	-	-	13,857,000
7.8	Biaya pembuatan profil pasar	-	34,558,500	-
7.9	Biaya sosialisasi, relokasi dan penataan pasar pasca gempa	-	-	43,118,300
	<b>PROGRAM KELENGKAPAN SARANA DAN PRASARANA PASAR</b>	<b>20,000,000</b>	<b>120,799,500</b>	<b>37,190,000</b>
<b>8</b>	Biaya pemeliharaan gedung tempat kerja	20,000,000	-	-
8.1	Biaya pembuatan kantor Pasar Deggung	-	49,268,500	-
8.2	Biaya perbaikan MCK Pasar Kalasan, Condong Catur, Kebonagung	-	-	37,190,000
8.3	Biaya pembuatan pagar bumi pasar kalasan	-	46,251,000	-
8.4	Biaya pembuatan pagar pasar pucung	-	25,280,000	-
	<b>TOTAL</b>	<b>281,111,150</b>	<b>470,291,000</b>	<b>591,346,800</b>
	<b>JUMLAH BI. TAK LANGSUNG DAN BI. LANGSUNG</b>	<b>1,732,446,406</b>	<b>2,586,732,780</b>	<b>3,308,681,148</b>



Uraian Realisasi Penerimaan dan Target Retribusi Pasar Kab. Sleman Tahun 2004-2006 (Rupiah)

Tahun	Uraian Realisasi Penerimaan				Total Retribusi	
	Retribusi Pasar	Retribusi Ijin Los, Kios, Bango	Retribusi Lerepan	Retribusi MCK	Realisasi	Target
2004	1.873.318.200	113.769.160	55.952.250	55.522.000	2.095.561.610	2.256.000.000
2005	2.037.000.000	132.324.000	56.978.000	59.071.500	2.344.681.850	2.300.000.000
2006	2.147.982.700	157.528.000	63.057.400	65.181.000	2.433.749.100	2.600.000.000

Sumber: KPPD Kab. Sleman

Target dan Realisasi PAD Kab. Sleman  
Tahun 2004-2006 (Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi
2004	53.919.261.011	70.499.050.997
2005	66.511.686.403	77.904.742.688
2006	75.792.320.330	86.640.745.947

Sumber: BPKKD Kab. Sleman

**TARIF RETRIBUSI PASAR**  
**SK. BUPATI NO : 1 / KEP. KDH / A / 2004 TGL. 3 / 1 / 04**

TYPE PASAR	TYPE			
JENIS RETRIBUSI	A	B	C	D
<b>I. RETRIBUSI PASAR (RP/M2/HR)</b>				
1. Di Dlm Los (3tk Los & Bango)	250	200	150	100
2. Di Luar Los	200	150	100	100
3. Di Dalam Kios	300	250	150	100
- Penambahan	500	400	200	150
4. Penjaja	400	200	200	200
<b>II. IJIN TEMPAT DASARAN (RP/M2/HR)</b>				
1. Los & Bango	2,500	2,000	1,500	1,000
2. Kios				
- Ke Luar/Jalan	5,000	4,000	3,000	2,000
- Ke Dalam	4,000	3,500	2,500	1,500
<b>III BIAYA BALIK NAMA</b>				
1. Org Tua kpd Anak Kandung	=	4 X 30 Hr X Retribusi		
2. Selain Org Tua Kpd Anak Kandung	=	8 X 30 Hr X Retribusi		
<b>IV. LAIN_LAIN</b>				
1. Pedagang Unggas	=	Rp. 200/ ekor / Hr		
2. Penjual Sepeda	=	Rp. 200/ Sepeda / Hr		
3. Hewan Besar (Sapi/Kerbau)	=	Rp. 2.000/ ekor/ Hr		
4. Hewan Kecil (Kambing/ Domba)	=	Rp. 500/ ekor/ Hr		
5. Titipan Brg/Lerepan Dlm Los/Bango	=	Rp. 50 / m2 / Hr		



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( BAPPEDA )

Alamat : Jl. Parasanya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511  
Telp. & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@sleman.go.id

**SURAT IZIN**

Nomor : 070 / Bappeda / 426 / 2007.

TENTANG  
PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55/Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.  
Menunjuk : Surat dari Ketua Program Studi, Fak. Ekonomi Univ. Sanata Dharma Yogyakarta Nomor : 31/Kaprodi Akt/034/I/2007 Tanggal : 29 Januari 2007. Hal : Perpanjangan Izin Penelitian.

MENGIZINKAN :

Kepada :  
Nama : **VERONICA WAHYU KRISTI M**  
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 032114003  
Program/Tingkat : S1  
Instansi/Perguruan Tinggi : USD Yogyakarta  
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Mrican 29 Yogyakarta  
Alamat Rumah : Gg. Sambu No. 2 Gejayan Yogyakarta  
Untuk : Mengadakan penelitian dengan judul:  
**"EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DASAR SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PAD"**  
Lokasi : Kab. Sleman  
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 10 Maret 2007 s/d 10 Juni 2007.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui kepala Bappeda.*
4. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.


Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman  
Pada Tanggal : 10 Maret 2007

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol. PP. dan Tibmas Kab. Sleman
3. Ka. BPKKD Kab. Sleman
4. Ka. Kant. Pengelolaan Pasar Daerah Kab. Sleman
5. Ka. Bid. Percn. Sosek Bappeda Kab. Sleman
6. Dekan Fak. Ekonomi-USD Yogyakarta
7. Ka. BPS Kab. Sleman
8. Ka. BKD Kab. Sleman
9. Portinggal.

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman  
Ka. Bidang Teknologi & Kerjasama  
u.b. Ka. Sub. Bid. Data & Informasi

  
**Dra. Hj. Sri Subekti Handayani**  
NIP. 010 253 131